

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: PeneBayu Media Publishing.
- Hamid, Basyaib. 2003. *Penyebaran Korupsi Luar Biasa*. Jurnal Resonansi Edisi Khusus
- Hamzah, Andi. 1987. *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill.
- _____. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- _____. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*.
- _____. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hartati, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka.
- Lamintang. 1981. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika.
- _____. P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- _____. P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Pebahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 1994. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Minarno, Nur Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Mediatama.
- Mochtar, Akil. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1993. *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- _____. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1988. *Pemerataan Keadilan Penangkapan Dan Penahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pena Multi Media.
- Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. 4. Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soedirdjo. 1981. *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*. Jakarta: Ahliyah.
- Soetjipto, Adi Andoyo. 2007. *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar*. Jakarta: Granit.
- Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Syamsuddin, Aziz 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibowo, Dwinanto Agung. 2011. *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wijaya, Firman. 2010. *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*. Jakarta.
- Wiyono, R. 2006 *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Dokumen

Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 7/PID.Sus-TPK/2015/PN.Smg.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun Lembaran Negara 1981)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun Lembaran Negara 1983)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun Lembaran Negara 1999)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun Lembaran Negara 2001)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun Lembaran Negara 2009)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 17 Tahun Lembaran Negara 1970)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun Lembaran Negara 1961)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun Lembaran Negara 2014)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun Lembaran Negara 2008)
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

D. Internet

- Ali, Utsman. *Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Para Pakar*. 18 Juli 2017. <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-pakar.html>.
- Aru. *Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk*. 18 Juli 2017. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15745/asas-praduga-tak-bersalah-tidak-bisa-diartikan-secara-iletterlijk>.

- Bawono Adi Condro dan Kusumasari Diana, *Pengertian Peradilan In Absentia*. 18 Juli 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia>.
- Bimbie. *Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Wewenang*. 20 Maret 2017. <http://www.bimbie.com/bentuk-wewenang.htm>.
- Centrum, Bhara. *Analisa Kasus Penyalahgunaan Wewenang Oleh KPK*. 19 September 2016. <https://developmentcountry.blogspot.co.id/2009/11/analisa-kasus-penyalahgunaan-wewenang.html>.
- Djafar, Wahyudi. *Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia*. 18 Juli 2017. <https://wahyudidjafar.web.id/2008/07/25/ketika-legalitas-memasuki-indonesia/>.
- Fileindi, M. Naufal. *Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, Dan Kaidah Yurisprudensi*. 2 Agustus 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514810646f40f/asas-legalitas,-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum,-dan-kaidah-yurisprudensi>.
- Haldi, Iman. *Akibat Hukum Jika Dakwaan Tidak Terbukti*. 17 Maret 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5122f7b84bed2/akibat-hukum-jika-dakwaan-tidak-terbukti>.
- _____. *Definisi Saksi Mahkota*. 9 Agustus 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>.
- Hasanah, Sovia. *Arti Persidangan Terbuka Untuk Umum*. 18 Juli 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum>.
- International, Transparency. *Korupsi*. 25 September 2016. <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>.
- Margaretha, Marry. *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*. 2 Agustus 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>.
- Ma'Ruf, Irham. *Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Dan Para Ahli*. 18 Juli 2017. <http://irham93.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html>.
- Mufza, Andi Akbar. *Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi - Compensatory And Rehabilitate*. 15 Agustus 2017.

<https://seniorkampus.blogspot.com/2014/07/asas-ganti-rugi-dan-rehabilitasi.html>.

Murdiana, Nyoman. *Beberapa Pandangan Ahli Hukum Mengenai Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*. 18 Juli 2017. <http://www.proseshukum.com/2016/10/beberapa-pandangan-ahli-hukum-mengenai.html>.

NPS, Law Office. *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*. 18 Juli 2017. <http://www.npslawoffice.com/asas-asas-hukum-acara-pidana/>.

Subakti, Metha Dewi. *Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. 17 Juli 2017. <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>.

Sudirdja, Rudi Pradiseta. *Rangkuman Buku Mengenal Hukum Karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.* 18 Juli 2017. <http://www.rudipradisetia.com/2010/09/rangkuman-buku-mengenal-hukum-karangan.html>.

Tobing, Letezia. *Tentang Asas Praduga Tak Bersalah*. 18 Juli 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>.

_____. *Tentang Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*. 18 Juli 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian>.

Yasin, Sanjaya. *Pengertian Pembuktian Hukum Acara*. 18 Juli 2017. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pembuktian-hukum-acara.html>.